

KM Mutiara Timur Bersama Puluhan Kendaraan Tenggelam di Selat Lombok

BALI (IM) - Setelah sempat dilakukan upaya pemadaman, KM Mutiara Timur I yang terbakar di Perairan Kubu Karangasem ini akhirnya tenggelam di Selat Lombok.

Sebelum kapal ini tenggelam masih terdengar beberapa kali ledakan dari dalam kapal. Akhirnya kapal miring hingga draf kapal menyentuh permukaan air laut.

Upaya pemadaman dengan melibatkan sejumlah kapal dilakukan sejak Rabu 16 November 2022 sore lalu. Kapal ini memang posisinya sudah miring ke kanan dan terus terseret arus hingga 7 mil laut dari posisi awal.

Posisi kapal semakin miring hingga bagian draf

kapal menyentuh permukaan air laut. Pada Kamis 17 November 2022 sore sekitar pukul 16.50 Wita, kapal yang membawa 253 penumpang bersama 30 ABK dan puluhan kendaraan truk ini akhirnya tenggelam di Perairan Karangasem dekat Selat Lombok.

Kepala KSOP Karangasem Padang Bai, Ni Luh Putu Eka Suyasmin mengatakan, setelah menerima laporan tenggelamnya kapal tersebut juga telah mengontak para nahkoda kapal yang berlayar di sekitar perairan tersebut untuk mengecek ke areal posisi kapal tersebut. Kemudian, dipastikan kapal tersebut sudah tidak terlihat lagi di permukaan laut. ● **mei**

KPK Konfirmasi Eks Wali Kota Lampung, Soal Titip Calon Mahasiswa ke Rektor Unila

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Lampung yang juga mantan Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, Kamis (17/11).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Herman dikonfirmasi soal dugaan penitipan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Lampung (Unila).

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus suap penerimaan mahasiswa baru yang menjerat mantan Rektor Unila Karomani dan bawahannya.

“Saksi ini dikonfirmasi antara lain terkait dengan penitipan dan penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Unila,” kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (18/11).

Sementara itu, kepada Tribunlampung.com, Herman mengaku pernah menitipkan seseorang agar bisa diterima di Fakultas Kedokteran Unila. Pernyataan ini disampaikan setelah menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK di Markas Polresta Bandar Lampung kemarin, Kamis (17/11).

“Bukan Farmasi tapi Fakultas Kedokteran Unila, tapi enggak diterima waktu itu,” kata Herman kepada wartawan.

Herman membantah telah memberikan sejumlah uang kepada pihak Karomani. Sebelumnya, Karomani dan sejumlah bawahannya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Bandung pada 20 Agustus lalu. Karomani diduga menerima suap hingga lebih dari Rp5 miliar terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila. ● **han**

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



HASIL SURVEI PILPRES 2024 VOXPOL CENTER
Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung (kiri), politisi PKS Muhammad Kholid (kedua kiri), politisi Partai Nasdem Jakfar Sidik (kedua kanan), dan moderator Aprillia Putri (kanan) menyimak pemaparan Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach & Consulting Pangsi Syarwi Chaniago terkait hasil survei nasional bertajuk Peta Elektoral dan Simulasi Kandidat Capres Cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Jumat (18/11).

PBNU Siap Kembalikan Rp100 Juta ke KPK jika Dana ke Muktamar ke-34 dari Suap Rektor Unila

Ketua PBNU Gus Fahrur menegaskan ta ada sumbangan untuk Muktamar ke-34 NU diperoleh dari cara yang tidak halal.

JAKARTA (IM) - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrurrozi atau Gus Fahrur mengatakan, pihaknya siap mengembalikan uang Rp100 juta kepada Komisi Pembe-

rantasan Korupsi (KPK) jika memang dana sumbangan untuk Muktamar Ke-34 NU itu terbukti bersumber dari suap. Sebagaimana diketahui, Wakil Rektor II Bidang Keuangan Unila Asep Sukohar

mengaku menggunakan uang Rp100 juta untuk melunasi biaya kesehatan Muktamar ke-34 NU di Lampung. Asep Sukohar mengaku, dana itu diambil dari uang suap orang tua mahasiswa yang telah diluluskan di Fakultas Kedokteran Unila. “Ya tentu saja (siap kembalikan), tapi saya sudah pastikan cek kepada panpel (panitia pelaksana) bahwa klaim itu tidak ada,” kata Fahrurrozi ke-

pada wartawan, Jumat (18/11). Pria yang kerap disapa Gus Fahrur mengingatkan agar pihak yang bersangkutan tidak asal menyebut aliran dana dengan mencatut panitia PBNU. Ia bahkan mempersilakan untuk membuktikan ada atau tidaknya aliran dana itu melalui pemeriksaan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Silakan saja melalui PPATK ditelusuri aliran dananya ke mana,” ujar Gus Fahrur.

Gus Fahrur mengatakan, panitia Muktamar ke-34 NU di Lampung, yang digelar pada Desember 2021 hingga Januari 2022 itu telah selesai melaporkan semua anggaran pelaksanaan muktamar.

Menurutnya, tidak terdapat sumbangan yang diterima PBNU dari cara yang tidak halal. Gus Fahrur menduga, penggunaan uang Rp100 juta itu merupakan inisiatif pribadi Asep Sukohar. Tindakan itu dilakukan tanpa melaporkan kepada panitia resmi Muktamar NU.

“Yang jelas tidak ada aliran dana dari dia ke panitia pelaksana muktamar,” kata Gus Fahrur menegaskan.

“Mungkin, dia menggunakan secara diam-diam untuk mendukung kandidat yang dia dukung, bukan untuk pelaksanaan muktamar,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, Asep Sukohar diperiksa sebagai saksi dalam sidang terdakwa penyuaan Rektor Unila Karomani, Andi Desfiandi. Selain menjabat sebagai Wakil Rektor

II Bidang Keuangan Unila, ia juga duduk sebagai Ketua Perhimpunan Dokter NU Lampung.

Di depan hakim, Asep mengaku menerima titipan uang Rp750 juta untuk Karomani. Uang itu berasal dari orang tua tiga mahasiswa Fakultas Kedokteran yang diluluskan Karomani.

“Yang pertama diserahkan senilai 350 juta dari wali mahasiswa atas nama Zuhriadi,” ujar Asep Sukohar dalam persidangan, Rabu (16/11).

Menjawab pertanyaan pengacara Andi, Asep mengaku menggunakan uang Rp100 juta melunasi biaya kesehatan Muktamar NU. Saat itu, Asep memang menjadi panitia bagian kesehatan Muktamar ke-34 NU di Lampung.

“Uang tersebut dipotong dari Rp350 juta yang diserahkan di awal,” kata Asep.

Asep mengaku menerima uang Rp400 juta dari orang tua dua mahasiswa. Dengan demikian, uang yang diterima Karomani untuk meloloskan tiga mahasiswa Fakultas Kedokteran itu sebesar Rp650 juta.

Sebelumnya, Karomani dan sejumlah bawahannya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Bandung pada 20 Agustus lalu. Karomani diduga menerima suap hingga lebih dari Rp5 miliar terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila. Sebagai rektor, Karomani berwenang mengatur mekanisme Seleksi Mandiri Masuk Unila (Simanila) tahun akademik 2022. ● **han**

Dianggap Menghina Ibu Negara Iriana Jokowi, Dihujat Netizen @koprofiljati Langsung Minta Maaf

BANTUL (IM) - Bantul sempat menjadi trending topik di media sosial Twitter. Hal tersebut bermula dari unggahan dugaan penghinaan Ibu Negara Indonesia Iriana Joko Widodo (Jokowi) mencuat di media sosial Twitter dan ramai diperbincangkan warganet.

Bahkan, dua anak presiden Jokowi, Kaesang Pengarep dan Gibran Rakabuming juga turut berkomentar. Postingan dari akun Twitter @koprofiljati ramai dibahas warganet Kamis 17 November 2022 malam.

Dugaan penghinaan tersebut muncul ketika @koprofiljati mengunggah sebuah foto istri Jokowi bersama istri presiden Korea Selatan Kim Kwon Hee. Postingan ini dianggap menghina Ibu negara karena dalam keterangannya, pengunggah foto tersebut menyertakan tulisan:

“Bi, tolong buat tamu kita minum.”
“Baik, Nyonya,” tulis caption itu dikutip, Kamis (17/11).

Sontak saja postingan tersebut mengundang ribuan komentar dari warganet. Mereka menyayangkan postingan tersebut dan banyak membela Ibu Negara. Tak sedikit yang lantas menelusuri pemilik akun.

Mereka menyayangkan postingan tersebut. Bahkan, ada yang membela jika Iriana adalah simbol orang Jawa yang kalem. Karenanya warganet terus berkomentar. Ribuan komentar memenuhi kolom komentar dengan berbagai tulisan.

Mereka menguliti pemilik

akun tersebut. Beberapa saat kemudian foto pemilik akun tersebut juga tersebar termasuk juga akun media sosial lainnya Facebook. Hingga akhirnya sebagian besar netizen menduga pemilik akun @koprofiljati berasal dari Bantul.

Tak hanya itu ada seorang netizen yang mengunggah bisnis pemilik akun yang diduga menghina Ibu Negara tersebut. Netizen tersebut mengunggah jika pemilik akun menjual buku-buku konten dewasa. Netizen lain juga mengunggah foto workshop yang bersangkutan.

Setelah mendapat hujatan dari warganet, pemilik akun akhirnya menghapus postingan tersebut dengan menulis “Sorry gaes. Postingan dgn gmbir ibu negara sy hapus. Kyny banyak yg salah paham menganggag org di gmbir tsb”

Dua anak presiden juga mengomentari postingan tersebut mengomentari postingan tersebut.

“Lha terus maksudmu gimana,” tulis Kaesang Pengarep “Salah paham?” tanya Gibran dalam balasan komentar @koprofiljati.

Namun, sekitar pukul 20.20 WIB akun tersebut ditangguhkan atau hilang. Netizen yang berusaha mengaksesnya ternyata sudah tidak bisa namun akun Facebooknya masih bisa diakses.

Dan Jumat (18/11) pagi, melalui akun Facebooknya Kharisma Jati akhirnya pemilik akun yang diduga menghina presiden meminta maaf secara terbuka.

Kharisma Jati menulis “Surat Terbuka Permintaan Maaf

Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta seluruh Keluarga Besar Kepresidenan.

Dengan ini saya, Kharisma Jati, meminta maaf kepada Keluarga Besar Presiden RI atas unggahan saya di media sosial yang menyinggung perasaan anggota keluarga Bapak Presiden Joko Widodo, termasuk kerabat, staf, dan pejabat di lingkungan kepresidenan. Permintaan maaf ini saya nyatakan dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam, tanpa unsur keterpaksaan maupun kepura-puraan.

Dan jika dari pihak terkait bermaksud mengadakan tuntutan hukum maka saya akan menerima dengan lapang dada atas segala hukuman yang adil dan setimpal.

Namun, tidak ada sedikitpun permintaan maaf saya terhadap para pendukung fanatik rezim ini, yang merasa bisa berbuat sesukanya sendiri tanpa mengindahkan moral dan etika, karena saya bukan penjilat; pembojo; maupun perunding, dan tidak sedikitpun saya membenarkan perbuatan semacam itu. Framing, fitnah, dan ujaran kebencian yang mereka buat hanya mencerminkan arogansi dan kemunafikan mereka.

Demikian surat terbuka ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun,” tulisnya. ● **han**



FOTO: ANT

PEMERIKSAAN IVAN DWI KUSUMA SUJANTO

Tersangka penyuaan Hakim Agung Sudrajad Dimiyati, Ivan Dwi Kusuma Sujanto (kiri) berjalan meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai pemeriksaan di Jakarta, Jumat (18/11). Ivan Dwi Kusuma diperiksa dalam kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Eks Ketua DPRD Jabar dan Istri Ditahan Kejari atas Kasus Penggelapan

JAKARTA (IM) - Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Irfan Suryanagara (IS) dan istrinya, Endang Kusumawaty (EK), ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi, Kamis (17/11).

Keduanya ditahan seiringan pelimpahan tersangka dan barang bukti yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditpid-eksus) Bareskrim Polri.

“Telah dilaksanakan tahap dua atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri kepada Kejari Cimahi terkait kasus tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan TPPU yang melibatkan dua orang tersangka, yakni IS dan EK. Saat ini keduanya dilakukan penahanan oleh Kejari Cimahi,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jumat (18/11).

Selain itu, Ramadhan memaparkan, ada beberapa barang bukti yang disita dari eks Ketua DPRD Jabar tersebut. Barang bukti yang disita itu diduga berasal dari hasil kejahatan para tersangka.

“Berupa empat unit SPBU di wilayah Jabar, dua unit rumah, satu unit vila, satu bidang tanah, tujuh rekening bank beserta dana di dalamnya, dan berbagai dokumen terkait lainnya,” ujar Ramadhan.

“Terhadap seluruh barang bukti telah dilakukan pengecekan lapangan bersama penyidik dan jaksa penuntut umum pada hari Rabu 16 November 2022,” katanya.

Sebelumnya, kedua tersangka dilaporkan oleh korban berinisial SG atas tindak pidana penipuan dan atau penggelapan serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) selama periode 2014-2019.

Kabag Penum Divisi Humas Kombes Nurul Azizah mengatakan, penipuan dilakukan dengan cara menjanjikan kerja sama dalam pembelian dan pengelolan SPBU. Kedua membujuk korban untuk membeli tanah dan rumah sebagai tempat tinggal karyawan SPBU.

“Atas hal tersebut, korban tidak pernah mendapatkan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh tersangka dan korban telah mengalami kerugian sebesar Rp77 miliar,” ujar Nurul.

Nurul mengungkapkan, pasangan suami istri itu telah ditangkap. Kemudian, polisi telah menyita barang bukti di antaranya empat unit SPBU di Karawang, Kota Cirebon, Sukabumi dan Pelabuhan Ratu.

Penyidik juga menyita dua unit rumah di Bandung dan Cimahi, satu unit vila di Sukabumi, dan satu bidang tanah di Kabupaten Sukabumi. ● **han**



FOTO: ANT

PENYELAMATAN SITUS MAKAM KUNO KERAJAAN ACEH

Prajurit Perhubungan Kodam Iskandar Muda bersama personil Polri dan warga merawat situs makam kuno peninggalan Kerajaan Aceh yang rusak terdampak bencana Tsunami 2004 di Desa Lampulo, Banda Aceh, Aceh, Jumat (18/11). Baksos penyelamatan situs makam kuno di sejumlah lokasi tersebut merupakan rangkaian kegiatan HUT ke-77 Perhubungan Angkatan Darat pada 23 November.

KPK Dalam Proses Penyertaan Modal APBD Pemkab PPU ke Perusahaan Daerah

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami proses penyertaan modal yang bersumber dari APBD Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) untuk Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Benuo Taka. Sebab KPK mencium ada kejanggalan dalam penyertaan modal tersebut.

Proses penyertaan modal tersebut didalami penyidik KPK lewat Sekretaris Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) PPU, Muhajir dan Kabid Anggaran BKAD PPU, S Arif Afandi. Keduanya diduga mengetahui proses penyertaan modal di Kabupaten PPU hingga pencairannya.

“Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan beberapa pembahasan yang dilakukan terkait dengan penyertaan modal APBD Pemda PPU ke Perusda Benuo Taka termasuk proses pencairannya,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (18/11).

Tak hanya itu, KPK juga telah memeriksa Kadis Kethanangan Pangan Kabupaten PPU, Surita dan Sekretaris Bapelitbang Kabupaten PPU, Yunita Liliana. Keduanya dikonfirmasi soal rapat-rapat yang membahas penyertaan modal untuk Perusda Benuo Taka.

“Untuk kedua saksi tersebut hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dilaksanakannya beberapa rapat dalam rangka penyertaan modal APBD Pemda PPU ke Perusda Benuo Taka,”

terangnya.

Sekadar informasi, KPK saat ini sedang menyidik kasus baru terkait dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang pada penyertaan modal di Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Penajam Paser Utara tahun 2019 sampai 2021. Kasus itu merupakan pengembangan dari perkara suap Abdul Gafur Mas’ud sebelumnya.

“Selama proses penyidikan perkara dugaan suap terdakwa Abdul Gafur Mas’ud, tim penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain yang diduga turut dilakukan yang bersangkutan selama menjabat Bupati Penajam Paser Utara,” kata Ali.

“Dugaan tindak pidana tersebut berupa penyalahgunaan wewenang pada penyertaan modal di Perusahaan Umum Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2019 sampai dengan 2021,” katanya.

KPK kembali menetapkan Abdul Gafur Mas’ud (AGM) sebagai tersangka dalam pengembangan perkara tersebut. Selain Abdul Gafur, KPK juga dikabarkan telah menetapkan sejumlah tersangka lainnya. Sayangnya, KPK belum membeberkannya secara detail nama-nama tersangka serta konstruksi perkara ini.

“Pengumuman para pihak sebagai tersangka, uraian dugaan perbuatan pidana dan pasal-pasal yang disangkakan akan kami sampaikan setelah proses penyidikan ini cukup yang kemudian dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan,” terangnya. ● **han**